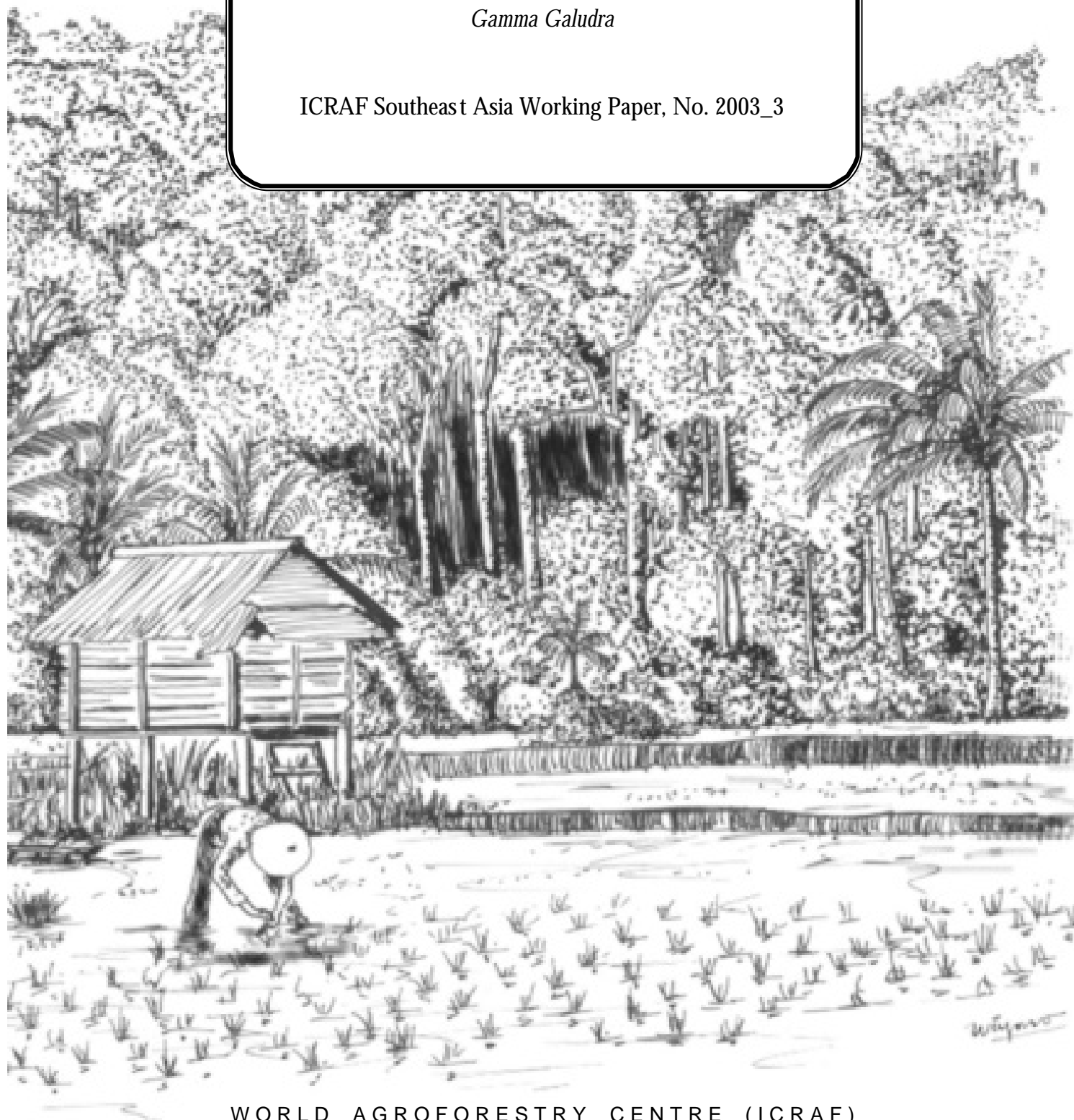


Kasepuhan and their socioculture interaction to the forest

Gamma Galudra

ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2003_3



Kasepuhan and their socioculture interaction to the forest

Gamma Galudra

ICRAF Southeast Asia Working Paper, No. 2003_3

Copyright ICRAF Southeast Asia

Further information please contact:

World Agroforestry Centre

Transforming Lives and Landscapes

ICRAF Southeast Asia Regional Office

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16680

PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: 62 251 625415, fax: 62 251 625416

Email: icraf-indonesia@cgiar.org

ICRAF Southeast Asia website: <http://www.icraf.cgiar.org/sea> or

<http://www.worldagroforestrycentre.org/sea>

Text layout: T Atikah

Cover design: Dwiati N Rini

Illustration design: Wiyono

Disclaimer

This text is a 'working paper' reflecting research results obtained in the framework of ICRAF Southeast Asia project. Full responsibility for the contents remains with the authors.

Contents

Executive summary	1
Masyarakat Kasepuhan dan Interaksi Sosiobudaya Mereka terhadap Hutan'	2
Pendahuluan	2
Sejarah kasepuhan	2
Sistem klasifikasi hutan menurut masyarakat kasepuhan	3
Perpindahan <i>kampung gede</i>	5
Sistem pertanian masyarakat kasepuhan	7
<i>Ladang/Huma</i>	7
<i>Talun</i>	8
<i>Kebun</i>	8
<i>Sawah</i>	9
Konflik: akibat interaksi dengan hutan	10
Kesimpulan	13
Daftar pustaka	14

Executive summary

This paper reviews the history of *kasepuhan* and their socioculture interaction to the forest. The aim of this paper is to provide information on socioculture issues of *kasepuhan* as an initial step to study stakeholders' activities in the forest surrounding Gunung Halimun-Salak National Park. *Kasepuhan* refers to a community or a social group where all members base their social activities on old or traditional customs.

The *kasepuhan* claimed themselves as descendants from Pajajaran Kingdom and ancestor of a one elite army of the kingdom. This community still practices their ancestry's ways of life (*tatali paranti karuhun*) by using forest farming area, *ngahuma*. They also frequently move their home from area to another area, looking for *uga lebak cawane*, the promised land by their ancestors. They believed that as long as they practice these ancestry's ways of life, prosperity and happiness will fill their life.

Based on their interaction to the forest, *kasepuhan* has created their own environmental knowledge by classifying forest into three types, *leuweung geledegan/kolot* (primary forest and protected areas), *leuweung titipan* (ancestral forest/entrusted forest) and *leuweung sampalan* (man-made forest, including grassland and fallow area). Unfortunately, the forest authority does not recognize the *kasepuhan*'s knowledge and consider them as a threat to the forest sustainability. These treatments by the forest authority have caused conflict against *kasepuhan*.

To overcome this conflict, understanding the value, norm and perception of the *kasepuhan* by the forest authority are immense. Further studies also need to be executed regarding on the *kasepuhan*'s knowledge to the scientific knowledge, such as water and soil conservation etc.

Masyarakat Kasepuhan dan Interaksi Sosiobudaya Mereka terhadap Hutan^{1,2}

Pendahuluan

Kawasan Gunung Halimun di Jawa Barat adalah suatu kompleks pegunungan yang sangat menarik, baik dilihat dari segi flora, fauna maupun dari segi sosiobudaya masyarakat penghuninya. Di kawasan hutan ini bermukim penduduk dalam kelompok kecil dan agak besar, membentuk perkampungan '*palemburan*' yang terpisah dari masyarakat desa pada umumnya. Perkampungan itu terpecah di bukit-bukit dan gunung-gunung. Di antara mereka ada pula yang tinggal berbaur bersama masyarakat desa yang kemudian membentuk kampung campuran. Pola perilaku sosiobudaya mereka hingga kini masih menunjukkan karakteristik budaya Sunda abad ke-16. Kelompok sosial yang bermukim di sekitar bukit-bukit dan gunung-gunung di kawasan Gunung Halimun menamakan dirinya masyarakat kasepuhan.

Terdapat 7 kasepuhan di sekitar kawasan Gunung Halimun, yaitu: kasepuhan Urug, Bayah, Cicarucub, Citorek, Cisungsang, Sirnaresmi dan Ciptagelar. Mereka menyebar di daerah Bogor Selatan, Lebak Selatan dan Sukabumi Selatan dalam bentuk sebuah ikatan yang bernama Kesatuan Adat Banten Kidul. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih menjalankan secara ketat apa yang mereka sebut *tatali paranti karuhun*. Salah satu kegiatan tersebut adalah menjadikan kawasan Gunung Halimun sebagai tempat berladang '*ngahuma*' beserta tata cara ritual yang mengiringinya. Namun, karena adanya kekhawatiran dari pihak kehutanan terhadap penggundulan hutan yang dapat menyebabkan erosi dan banjir, maka masyarakat kasepuhan tidak diperkenankan lagi membuka kawasan hutan untuk perladangan. Nampaknya, interaksi masyarakat kasepuhan terhadap hutan dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman bagi kelestarian hutan.

Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan pada interaksi antara masyarakat kasepuhan dengan hutan di kawasan Gunung Halimun dengan mencoba menganalisis hasil penelitian sebelumnya kegiatan sosio-budaya mereka yang berkaitan dengan hutan dan akibat yang timbul dari interaksi tersebut, dalam hal ini konflik dengan pihak kehutanan.

Sejarah kasepuhan

Kasepuhan berasal dari suku kata *sepuh* atau tua dan dari kata tersebut kemudian muncul pengertian *sesepuh*, yaitu orang yang di"tua"kan dan biasanya memimpin suatu organisasi. Kata "kasepuhan" dalam konteks tulisan ini, mengacu pada pemahaman terhadap suatu kelompok sosial, di mana semua aktivitas warganya masih berazaskan pada adat-istiadat lama sebagai warisan nenek moyang yang antara lain tampak berupa tata cara menanam dan memelihara padi di *huma* (ladang) (Adimihardja, 1999).

Berdasarkan sejarah lisan (Pantun Bogor *Dadap Malang Sisi Cimandiri* dan Sumber Banten), sejarah kasepuhan berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Hindu Pajajaran pada tahun 1579 oleh serangan Sultan Maulana Yusuf dari Kerajaan Islam Banten (Adimihardja, 1992). Masyarakat kasepuhan mengklaim diri mereka sebagai pewaris dari Prabu Siliwangi, Raja

¹ Tulisan ini dilakukan dalam kegiatan "*Halimun Project: Negotiation Support for Improved Governance and Natural Resource Management in Indonesia*" disupervisi oleh Chip Fay (*Senior Policy Analyst*) dan Martua Sirait (*Land and Resource Tenure Researcher*); dan berkolaborasi dengan Tim Kebun ICRAF dan RMI (Rimbawan Muda Indonesia).

² Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Kusnaka Adimihardja (*INRIK-UNPAD*) atas masukannya.

dari Kerajaan Hindu Pajajaran, dan keturunan dari kelompok pengawal kerajaan (*Bareusan Pangawinan*).

Dikisahkan bahwa pada saat Kerajaan Pajajaran diserbu oleh Kerajaan Banten, ada tiga pemimpin utama *Bareusan Pangawinan*, yaitu Demang Haur Tangtu, Guru Alas Luminang Kendungan, dan Puun Buluh Panuh yang ditugasi oleh raja untuk membawa dan menyelamatkan pohon ajimat *hanjuang bodas* (*Cordyline fructuosa*). Ketiga pimpinan utama kelompok tersebut bersama raja mundur ke arah selatan, ke sebuah tempat yang disebut Tegal Buleud (Adimihardja, 1992).

Diceritakan pula bahwa sebelum menghilang, sang raja membagi-bagi pengikutnya dalam kelompok kecil dan memberi pesan berupa *Wangsit Siliwangi* atau petunjuk nenek moyang, berisi: “bagi sesiapa yang mengikutiku, pergilah ke selatan; bagi sesiapa yang ingin kembali ke kota, pergilah ke utara; bagi sesiapa yang loyal ke pemenang, pergilah ke timur; bagi sesiapa yang mengikuti keinginan sendiri, pergilah ke barat”.

Ketiga pemimpin utama memilih kembali ke kota yang ditinggalkan, namun mereka tidak berhasil mencapainya. Di tengah jalan, mereka memutuskan untuk berpisah, menempuh hidup masing-masing meskipun mereka tetap memelihara hubungan. Keturunan Demang Haur Tangtu ini kemudian berkembang dan biasanya menyebut diri sebagai kasepuhan (keturunan dari pimpinan utama *Bareusan Pangawinan*). Demang Haur Tangtu menurunkan masyarakat kasepuhan dari istri yang bernama Nini Buyut Tundasara.

Namun, terdapat dua versi lain tentang asal usul masyarakat kasepuhan (Dienaputra, 2003). Pertama, masyarakat kasepuhan ini berasal dari mantan anggota pasukan dan masyarakat yang setia dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjadikan wilayah di seputar Kawasan Gunung Halimun (yang termasuk wilayah Lebak dan Bogor) sebagai daerah gerilya saat berlangsung perang berkepanjangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji pada abad ke-17. Kedua, komunitas kasepuhan bisa juga berasal dari para mantan anggota Pasukan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang, yang sewaktu mengadakan perang dengan VOC pada abad ke-18, menjadikan wilayah Kawasan Gunung Halimun sebagai daerah basis perlawanan. Keturunan sisa-sisa anggota pasukan ini yang berasal dari Kerajaan Mataram masih hidup di sekitar daerah Kecamatan Bayah dan menamakan dirinya sebagai kasepuhan pancur mandiri (Adimihardja, 1992).

Sistem klasifikasi hutan menurut masyarakat kasepuhan

Sistem klasifikasi hutan di kalangan masyarakat kasepuhan sejalan dengan penggolongan yang didasarkan pada sistem pengetahuan mereka tentang hutan yang merupakan sumber kehidupannya. Mereka mengenal tiga jenis hutan di sekitar lingkungannya (Adimihardja, 1992), yaitu:

1. *Leuweung kolot* atau biasa pula mereka sebut *leuweung geledegan*, ‘hutan tua’, yaitu hutan yang masih lebat ditumbuhi berbagai jenis pohon besar dan kecil (*geledegan*). Ciri-ciri jenis hutan tersebut ialah pepohonannya rimbun, tingkat kerapatannya sangat tinggi, dan berbagai jenis binatang hidup di dalamnya. Daerah yang diyakini kawasan *leuweung geledegan* adalah kawasan sekitar puncak Gunung Halimun, Gunung Bengbreng, Gunung Nirmala dan Gunung Sanggabuana (Harimurti, 1997).
2. *Leuweung titipan* adalah hutan yang diakui oleh semua masyarakat kasepuhan sebagai hutan keramat. Jenis hutan semacam ini sama sekali tidak boleh dieksploitasi oleh siapa pun tanpa seizin *sesepuh girang*. Kelestariannya harus dipertahankan. Penggunaan hutan tersebut dimungkinkan apabila telah diterima semacam *wangsit* atau *ilapat* dari nenek moyang mereka melalui *sesepuh girang*. Bagi warga kasepuhan, Gunung Ciawitali (*Leuweung Ciawitali*) dan Gunung Cibareno (*Leuweung Cibareno*) diyakini sebagai kawasan *leuweung titipan* yang letaknya memang berada di dalam kawasan taman nasional (Harimurti, 1997).

3. *Leuweung sampalan* yaitu hutan yang dapat dieksploitasi manusia secara luas. Pada jenis hutan ini, manusia boleh membuka ladang, menggembalakan ternak, mengambil kayu bakar, dan lain-lain. Jenis hutan ini biasa pula disebut *leuweung bukaan*, 'hutan yang dapat dibuka'.

Peneliti lain (Kuswanda, 1999) menjelaskan bahwa masyarakat kasepuhan mengklasifikasikan hutan ke dalam 4 jenis hutan yaitu:

1. *Leuweung titipan* yaitu hutan warisan nenek moyang mereka yang dianggap keramat. Daerah hutan ini biasanya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan nilai keagamaan atau memiliki situs-situs yang dipercaya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kasepuhan. Karena merupakan titipan kepercayaan dari leluhurnya, hutan ini akan selalu dipertahankan keberadaannya.
2. *Leuweung tutupan/geledegan* yaitu hutan primer yang sama sekali tidak boleh dipergunakan/dibuka oleh manusia, karena merupakan daerah penyangga mata air penting masyarakat kasepuhan. Daerah hutan ini masih lebat ditumbuhi berbagai jenis pohon besar dan kecil.
3. *Leuweung awisan* (hutan cadangan), yaitu areal hutan yang dicadangkan untuk mengantisipasi perluasan *incu putu* Kasepuhan. Zona hutan ini dapat dibuka menjadi pemukiman atau lahan garapan oleh *incu putu* Kasepuhan setelah diperbolehkan oleh *karuhun* dengan perantaraan *wangsit* melalui *Sesepuh Girang*.
4. *Leuweung sampalan* (hutan garapan), yaitu zona hutan sekunder yang boleh dibuka dan dijadikan areal pertanian atau pemukiman.

Kedua konsep ini pada dasarnya sama, hanya nampak berbeda karena Kuswanda (1999) membedakan hutan titipan menjadi dua jenis, yaitu hutan titipan dimana berhubungan dengan hal-hal yang keramat sehingga perlu dipertahankan dan hutan awisan sebagai hutan cadangan. Di lain pihak, Adimihardja (1992) menggabungkan kedua jenis hutan ini menjadi satu, yaitu hutan titipan. Jika ditelusuri lebih lanjut, pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hutan titipan sama dengan pemahaman dan pengetahuan terhadap hutan awisan, yaitu sebagai hutan cadangan yang hanya dapat dieksploitasi kelak apabila telah ada *wangsit*.

Hutan titipan menurut masyarakat kasepuhan terbagi atas dua:

1. *Rurukan luar*, yaitu hutan cadangan yang pada suatu saat pindah nanti akan digunakan untuk keperluan lahan pertanian/garapan warga, yaitu sebagai lahan talun, kebun, dan *huma* (ladang).
2. *Rurukan jero*, yaitu hutan cadangan yang pada suatu saat pindah nanti akan digunakan untuk keperluan *pilembureun* (perkampungan/perumahan) (INRIK dan KEHATI, 1999).

Namun berbeda dengan hutan tutupan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kasepuhan untuk kebutuhan sehari-hari, hutan titipan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dengan syarat meminta izin terlebih dahulu kepada *sesepuh girang*. Jenis-jenis pemanfaatan hutan titipan yang dapat dilakukan adalah berupa berbagai jenis tanaman obat, berbagai jenis tanaman yang biasa digunakan untuk kebutuhan atap rumah serta jenis kayu untuk bahan bangunan bagi kepentingan bangunan bumi *ageung* (tempat tinggal *sesepuh girang* beserta keluarga, saudara dan pembantunya), bukan kepentingan bangunan lainnya (INRIK dan KEHATI, 1999).

Pengklasifikasian ini selain mempengaruhi masyarakat kasepuhan dalam bentuk pemanfaatan jenis kayu-kayuan untuk kebutuhan sehari-hari seperti rotan untuk membuat *kaneron* dan *lampit* (tikar), bambu untuk membuat alat-alat rumah tangga, kayu bakar dan bangunan untuk rumah (Kompas, 23 Agustus 2003a), juga mempengaruhi masyarakat kasepuhan dalam pemanfaatan hutan untuk kegiatan perpindahan kampung *gede* dan perladangan berpindah.

Kegiatan perladangan berpindah diawali dari pemilihan lahan di sekitar tempat yang menurut pandangan mereka diklasifikasikan ke dalam hutan sampalan/hutan titipan. Biasa dibangun pula rumah yang memiliki ladang tersebut yang lama kelamaan menjadi kampung. Biasanya bekas perladangan tersebut tidak langsung diolah kembali, tetapi diistirahatkan sekitar 4 sampai 5 tahun (*bero*) agar tanah tersebut subur dan menjadi hutan kembali. Pada tahun pertama setelah kawasan itu dipanen, maka kawasan tersebut sudah ditumbuhi berbagai tanaman liar yang rimbun, dimana keadaan tersebut disebut **jami**. Bekas lahan ladang tersebut ada juga yang dibangun menjadi **sawah** apabila aliran airnya cukup baik.

Sebagian lahan tersebut ada yang ditanami tanaman buah-buahan, seperti durian, rambutan, petai, cengkih dan lain-lain. Lahan ini menyerupai hutan buatan yang biasanya mereka sebut **leuweung talun**. Untuk kawasan **jami** yang kemudian ditanami berbagai sayuran, ubi jalar, singkong, jagung dan lain-lain disebut **kebun talun**, dan bila pemeliharannya lebih intensif biasa disebut **kebun**. Bila jami itu telah mulai tumbuh semak belukar yang masih muda, biasa disebut **reuma kolot** dan bila semak belukar dan tumbuh-tumbuhan lain sudah menjadi besar dan bertahun-tahun dibiarkan saja, maka disebut **leuweung** (hutan).

Perpindahan kampung gede

Kampung Gede adalah tempat *Sesepuh Girang* bermukim. *Sesepuh Girang* adalah pemimpin turun temurun yang diyakini oleh segenap warga kasepuhan sebagai orang yang terpilih dan mendapat titisan daya spiritual dari para dewa dan para nenek moyang untuk melanjutkan kepemimpinan masyarakat. Selain sebagai pusat orientasi sosial budaya dan keagamaan masyarakat kasepuhan, kampung gede juga merupakan pusat pemerintahan adat yang mengatur aktivitas mereka di kawasan Gunung Halimun tersebut. Dilihat dari perkembangan sejarahnya, *Kampung Gede* tidak pernah menetap di suatu tempat tertentu, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kehendak *Sesepuh Girang* (Asep, 2000).

Adimihardja (1992) beranggapan bahwa perpindahan *Kampung Gede* terkait erat dengan kepercayaan masyarakat kasepuhan tentang *lebak cawane*. Dalam masyarakat kasepuhan berkembang mitos yang menyatakan bahwa *lebak cawane* ini merupakan suatu tempat rahasia yang bilamana ditemukan akan mendatangkan kemakmuran, ketenteraman, dan kesentosaan dalam kehidupan sosialnya. Menurut kepercayaan, *lebak cawane* ini terletak di sebuah hutan yang berada di wilayah Cisolok, Sukabumi (Harimurti, 1997). Djatisunda (1984) menyebutkan lokasi *lebak cawane* tersebut tepat di *Lebak Ciawitali*. Namun, keterangan yang berbeda menjelaskan bahwa perpindahan *Kampung Gede* lebih merupakan kehendak *karuhun* yang disampaikan melalui *wangsit* kepada *Sesepuh Girang*. Keterangan lain bahkan menjelaskan bahwa perpindahan tersebut berkaitan untuk mendekati daerah-daerah pakaya (tempat bekerja/sawah) yang mereka miliki (Harimurti, 1997), sistem pertanian masyarakat Sunda dahulu, *huma* atau pertanian ladang berpindah (Adimihardja, 1983) dan/atau padatnya populasi di kampung mereka terdahulu yang dikhawatirkan akan mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Kompas, 23 Agustus 2003b).

Terlepas dari penjelasan diatas, Asep (2000) memandangnya sebagai suatu strategi yang cerdas dalam merespon tekanan populasi yang erat kaitannya dengan aspek ekologis, demografis dan politis. Pertama, secara ekologis perpindahan Kampung Gede ini mengeliminir tekanan populasi yang mengakibatkan terancamnya keseimbangan ekologis karena terlampaui daya dukung maksimal kampung tersebut. Kedua, secara demografis, strategi perpindahan ini mengakibatkan pola penyebaran penduduk yang lebih merata di kawasan Pegunungan Halimun yang menjadi lingkup wilayah pemerintahan adat. Ketiga, secara politis, penerapan strategi ini dapat mendukung terpeliharanya keutuhan wilayah serta meningkatkan integritas dan loyalitas para pengikut terhadap *Sesepuh Girang* karena adanya pemerataan akses masyarakat terhadap pemimpinnya.

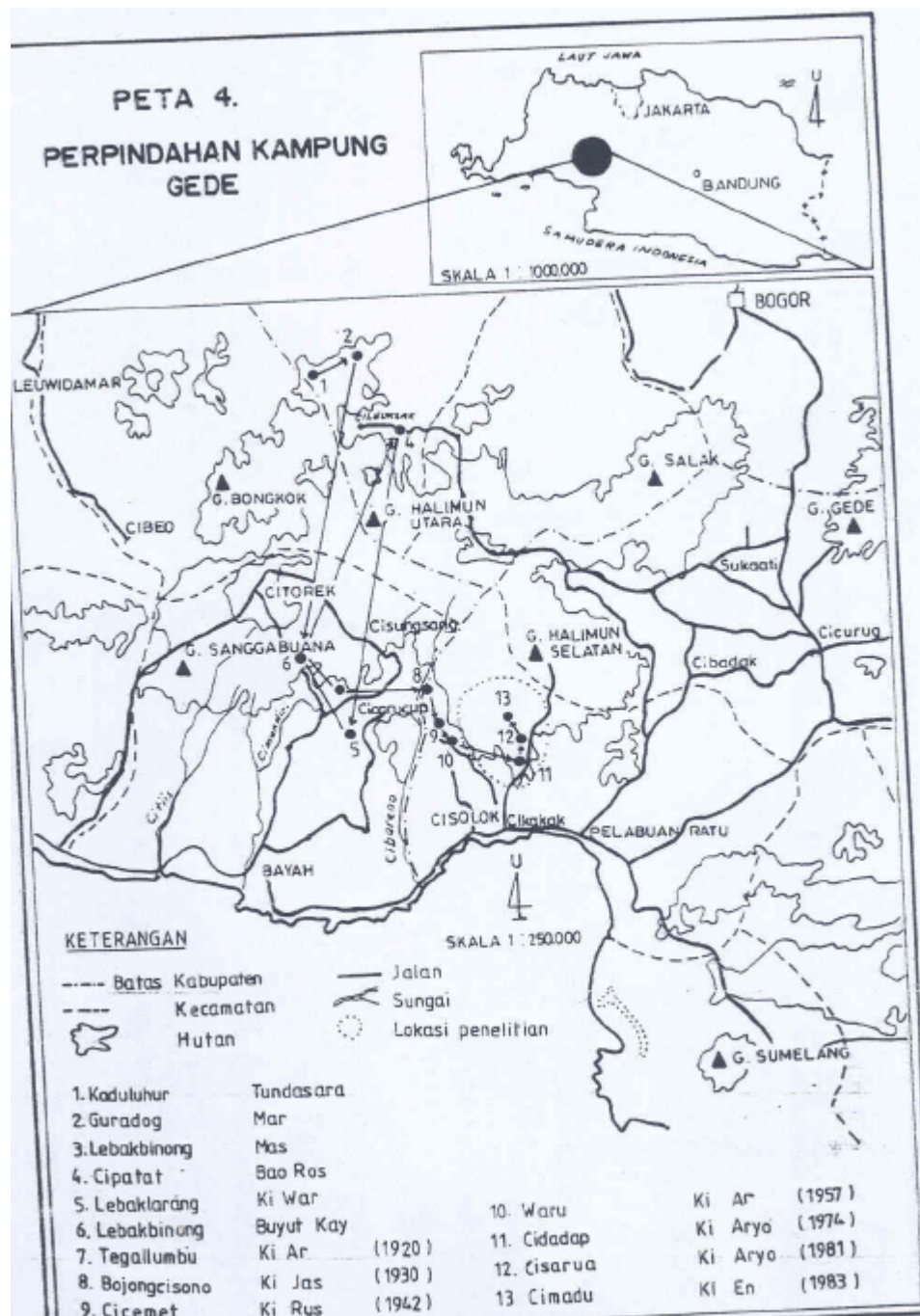
Akibat dari usaha masyarakat kasepuhan untuk mendekati *lebak cawane*, Adimihardja (1992) menghitung perpindahan kampung gede sebanyak 13 kali. Bermula dari perpindahan

kampung gede dari Kampung Guradog ke Kampung Kaduluhur, Bogor Selatan, dimana Nini Tundasara berasal. Beberapa masyarakat kasepuhan ada yang pindah ke Kampung Citorek, Lebak Selatan dan mengembangkan *kasepuhan Citorek*. Kemudian, putranya, Martayuda memindahkan kampung gede ke Guradog Kaler, dimana dia tinggal sampai akhir hayatnya. Pengganti Martayuda, Maskara, memindahkan kampung gede jauh dari Bogor Selatan ke Kampung Lebak Binong, Lebak Selatan. Namun, pengganti Maskara, Bao Rosa mengembalikan tempat kampung gede ke Bogor Selatan, di Cipatat Kolot.

Anak kedua Bao Rosa Ki Warni, memindahkan kampung gede ke Lebak Selatan, di Lebak Larang, sedangkan anak sulungnya, Ki Buyut Ij menetap di Kampung Urug, Bogor Selatan dan mengembangkan *kasepuhan Urug*. Di lain pihak, adik Bao Rosa, Ki Buyut Kas, mengembangkan *kasepuhan Cicarucub*. Kemudian, anak pertama dari Ki Warni, Ki Kayon, memindahkan kampung gede ke kampung sebelumnya, Kampung Lebak Binong, Lebak Selatan. Putra Ki Kayon, Ki Arikin, memindahkan kampung gede ke Kampung Tegallumbu, Lebak Selatan.

Anak keempat Ki Arikin, Ki Jasiun, memindahkan kampung gede dari Lebak Selatan ke Sukabumi Selatan, di Kampung Bojongcisono. Kemudian, putra Ki Jasiun, Ki Rusdi, memindahkan kampung gede ke Kampung Cicemet, Sukabumi Selatan. Putra kedua dari Ki Rusdi, Ki Ardjo, memindahkan kampung gede sebanyak tiga kali, ke Kampung Waru, Cidap dan terakhir Cisarua. Semua kampung ini berada di Sukabumi Selatan. Sepeninggal Ki Ardjo (1983), terjadi konflik keluarga antara Ujat (putra dari istri ketiga Ki Aryo) dan Encup Sucipta (putra dari istri kelima Ki Aryo). Ujat mengklaim sendiri sebagai pemimpin kasepuhan yang sah dan mengembangkan *kasepuhan Sirnaresmi*. Namun, Sucipta (Abah Encup) yang dipilih oleh ayahnya sebagai pemimpin kasepuhan mengembangkan *kasepuhan Ciptarasa* dan memindahkan kampung gede ke Cimadu.

Yogaswara (2001) memandang dua alasan lain yang melatarbelakangi timbulnya perpindahan kampung gede. Pertama, aspek perlawanan terhadap dominasi Islam membuat masyarakat kasepuhan sembunyi dengan cara berpindah-pindah. Kedua, aspek politis dalam perpindahan ini menambah jumlah pengikut dan lahan penguasaan.



Sumber: Adimihardja (1992)

Sistem pertanian masyarakat kasepuhan

Selain kegiatan pemanfaatan hutan untuk pemukiman dan flora, masyarakat kasepuhan juga memanfaatkan hutan untuk dijadikan sawah, ladang/*huma* dan kebun/*talun*. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana masyarakat kasepuhan melakukan pengelolaan ladang/*huma*, *talun*, kebun dan sawah.

Ladang/*Huma*

Kegiatan berladang (*ngahuma*) bagi masyarakat kasepuhan merupakan suatu hal yang penting dalam perjuangan hidup mereka sebagai suatu kelompok sosial. Kegiatan berladang juga merupakan suatu tradisi untuk melanjutkan *tatali paranti karuhun* (tata cara nenek moyang)

(Adimihardja, 1992). Ladang/*huma* adalah hutan sekunder atau *reuma* yang digunakan oleh masyarakat untuk menanam padi ladang, tanaman palawija dan tanaman keras (Kurniawan, 1999). Masyarakat kasepuhan percaya bahwa *huma* merupakan wujud nyata hubungan antara masyarakat kasepuhan dan alam.

Anjuran untuk menanam padi di *huma* berawal dari perintah Dewa Barata Guru melalui Ki Bagawan agar Prabu Siliwangi menanam berbagai jenis padi-padian di seluruh kawasan kekuasaannya. Karena berkah dari Dewa Guru yang menganjurkan penanaman padi, Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Hal ini memperkuat keyakinan masyarakat kasepuhan bahwa padi merupakan sumber kehidupan dan jaminan bagi ketenteraman dan keselamatan hidup mereka (Adimihardja, 1992).

Jenis tanaman utama yang ditanam di ladang adalah tanaman padi (*Oryza sativa*) sebagai wujud personifikasi dari Dewi Sri. Oleh sebab itu, setiap kegiatan, baik pemilihan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan dan panen di ladang, selalu diikuti upacara agar nenek moyang mereka melindunginya, dan mereka terhindar dari berbagai bencana. Jenis padi yang biasa ditanam adalah jenis padi lokal atau yang disebut *pare ageung* atau *pare renggeuy*. Beberapa jenis tanaman lain yang ditanam di ladang yaitu pisang (*Musa paradisiaca*), singkong (*Manihot esculenta*), petai (*Parkia speciosa*), mentimun (*Cucumis sativus*), cabe merah (*Capsium annum*), cabe rawit (*Capsium frutescens*), buncis (*Phaenolus vulgaris*), kacang panjang (*Vigna sinensis*), kacang tanah (*Arachis hypogaea*), terubus (*Sesamum edule*), kelapa (*Cocos nucifera*), jaat (*Psopocarpus tetragonolobus*), hiris (*Cajanus cajan*), dan wijen (LEAD dan INRIK, 1995).

Umumnya, *huma* dikelola secara intensif untuk jangka waktu 1-3 tahun atau sampai kondisi tajuk tanaman kerasnya tidak memungkinkan lagi untuk menanam padi. Setelah jangka waktu tersebut, petani membuka *huma* baru atau membuka kembali *huma* yang telah lama ditinggalkan selama beberapa tahun sebelumnya, setelah tanaman kerasnya dipanen baik buah maupun kayunya (Kurniawan, 2002).

Talun

Seperti yang dikemukakan oleh Adimihardja (1992) dan Kurniawan (2002), *talun* adalah bekas kawasan ladang (*huma*) atau yang biasa disebut *jami*, yang kemudian digarap dengan ditanami berbagai jenis tanaman keras, tanaman buah-buahan dan palawija. Bila dilihat dari intensitas pemeliharaannya, maka lahan *talun* dapat dibagi menjadi dua jenis (LEAD dan INRIK, 1995), yaitu:

1. *Kebon talun*, yaitu *talun* yang dipelihara cukup baik dan ditanami berbagai tanaman keras yang dapat berbuah seperti durian (*Durio zibethinus*), petai (*Parkia speciosa*), jengkol (*Pithecelobium jeringa*), mangga (*Mangifera indica*), cengkih (*Syzygium aromaticum*) dan sebagainya. Selain itu juga ditanami jenis tanaman pisang (*Musa paradisiaca*), terubus (*Scacharum edule*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), singkong (*manihot esculenta*), jagung (*Zea mays*) dan lain-lain.
2. *Leuweung talun*, yaitu lahan *talun* yang sudah ditumbuhi semak belukar dan berbagai jenis tanaman lain yang tumbuh sendiri, karena tidak dipelihara lagi oleh pemiliknya dengan berbagai sebab. Lahan ini menyerupai hutan dan diantaranya jenis tanaman yang tumbuh, terdapat pula berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti nangka (*Artocarpus heterophylla*), durian (*Durio zibethinus*), rambutan (*Nephelium leppaceum*), mangga (*Mangifera indica*), dan juga berbagai jenis tanaman keras seperti petai (*Parkia speciosa*), jengkol (*Pithecelobium jeringa*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), kopi (*Coffea canephora*), enau/aren (*Arenga pinnata*) dan sebagainya.

Kebun

Kebun adalah perkembangan lebih lanjut dari tanah bekas ladang (*jami*) yang ada di sekitar pemukiman. Tanah ini kemudian diolah secara intensif untuk ditanami berbagai jenis

tanaman yang menunjang kebutuhan dapur. Berbagai jenis sayuran yang ditanam di kebun adalah trubus (*Sccharum edule*), terung (*Solanum melogena*), jaat (*Psopocarpus tetragonlobus*), kacang panjang (*Vigne sinensis*), serai (*Piper betle*), honje (*Achasma megalochelos*), surawung (*Ocinum basilicum*), takokak (*Solanum torvum*), tomat (*Solanum lycopersicon*) dan cabe merah (*Capsium annum*).

Selain jenis tanaman sayuran, di kebun juga ditanam berbagai jenis tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat-obatan, seperti sirih (*Piper betle*), kumis kucing (*Orthosiphon aristatus*), handeuleum (*Graptophyllum pictum*) dan belimbing (*Averrhoa carambola*). Di kebun juga terdapat berbagai jenis tanaman keras yang buahnya bisa dijadikan sayuran, seperti petai (*Parkia speciosa*), jengkol (*Pithecelobium jeringa*), kelapa (*Cocos nucifera*) dan tangkil (*Gnetum gnemon*) (Adimihardja, 1992; LEAD dan INRIK, 1995).

Sawah

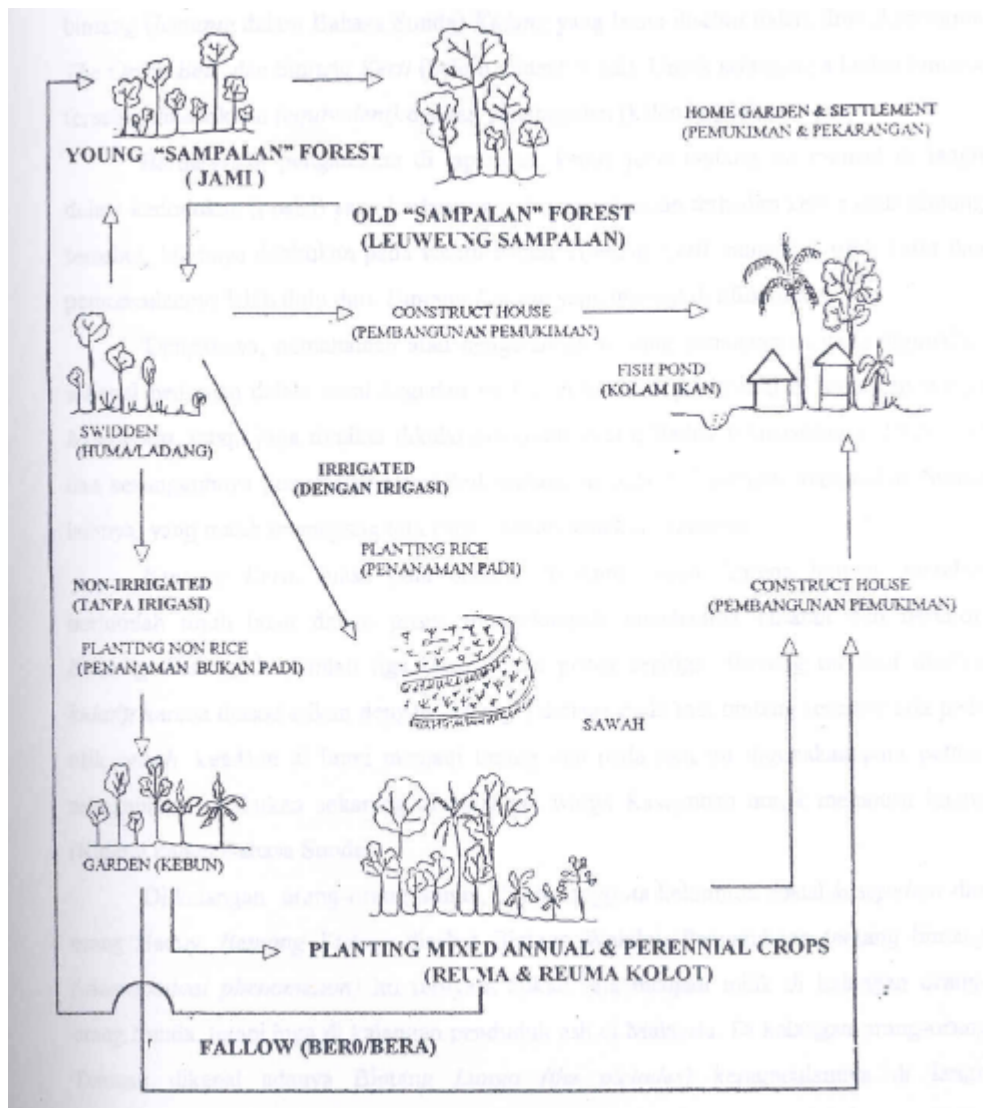
Lahan sawah yang ada di wilayah kasepuhan merupakan pengembangan dari pemanfaatan lahan ladang yang telah dilakukan sebelumnya oleh penduduk. Lahan ladang yang dikembangkan menjadi lahan sawah ini adalah bekas lahan ladang yang dianggap memiliki pengairan yang cukup, dan cocok baik bila dijadikan lahan sawah (Adimihardja, 1992; LEAD dan INRIK, 1995).

Sistem pertanian sawah bukan merupakan pola tradisional masyarakat kasepuhan, hanya merupakan proses adaptasi terhadap tekanan populasi yang semakin kuat dan berkurangnya lahan garapan. Walaupun tidak dianjurkan oleh *karuhun*, sistem pertanian ini dapat memenuhi jaminan subsistensi mereka, bahkan secara ekonomis hasil panen di sawah lebih menguntungkan daripada hasil di *huma* (Asep, 2000).

Masyarakat kasepuhan mengklasifikasikan sawah menjadi 3 jenis berdasarkan ketersediaan airnya (Kurniawan, 2002), yaitu:

1. Sawah *Boyor*, yaitu sawah yang airnya tersedia sepanjang tahun.
2. Sawah *Geledug*, yaitu sawah yang airnya hanya tersedia pada musim hujan.
3. Sawah *Garung*, yaitu sawah yang kering atau dibiarkan kering. Biasanya sawah yang tidak diolah kembali.

Sama halnya dengan di ladang/*huma*, sawah ditanami oleh padi (*pare ageung/pare renggeuy*) dan setiap kegiatan di sawah selalu disertai oleh upacara mohon doa restu kepada nenek moyang. Penanaman padi hanya dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun sesuai dengan anjuran dari nenek moyang mereka di *huma*. Selanjutnya, lahan sawah yang telah kering biasanya digunakan untuk menanam palawija seperti jagung (*zea mays*), jenis sayuran dan kacang-kacangan atau digunakan untuk kolam ikan.



Sumber: LEAD dan INRIK (1995)

Konflik: akibat interaksi dengan hutan

Bagian tulisan ini membahas akibat dari masyarakat kasepuhan berinteraksi dengan hutan, berupa konflik. Penyebab utama konflik adalah adanya larangan dari pihak kehutanan (Taman Nasional dan Perum Perhutani) bagi masyarakat kasepuhan dalam menggunakan hutan. Hutan bagi masyarakat kasepuhan bukan hanya sebagai bagian dari sumber penghidupan utama mereka, tetapi juga sebagai bagian budaya warisan nenek moyang mereka (Adimihardja, 1992).

Larangan ini berdasarkan kepercayaan petugas kehutanan bahwa pembukaan hutan untuk ladang beserta pemanfaatan hasil hutan dapat mengakibatkan bahaya erosi, banjir dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, penelitian LEAD dan INRIK (1995) menemukan bahwa kegiatan pertanian di lahan hutan, didukung oleh pengklasifikasian hutan, bermanfaat bagi terpeliharanya sumber air dan terjaganya tanah dari bahaya erosi. Sayangnya, larangan pemanfaatan hutan ini masih tetap berlaku.

Adimihardja (1992) telah mengidentifikasi 2 larangan dari pihak kehutanan dan dampak dari larangan ini terhadap masyarakat kasepuhan:

1. Larangan pemanfaatan kayu (bakar dan bangunan), bambu dan rotan di dalam hutan. Larangan itu bagi warga kasepuhan secara ekonomi benar-benar merupakan tindakan yang sangat merugikan. Selain itu, larangan tersebut juga mengurangi alokasi waktu yang biasa mereka gunakan bagi kegiatan seusai pekerjaan di kebun, ladang, dan sawah.
2. Larangan terhadap budaya perladangan berpindah. Larangan ini mengakibatkan berkurangnya lahan garapan bagi masyarakat kasepuhan sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. Selain itu, larangan ini dapat mengancam nilai-nilai budaya yang mereka miliki secara turun-temurun.

Dampak terbesar dari kedua larangan ini bagi masyarakat kasepuhan adalah hilangnya sistem pengetahuan masyarakat kasepuhan tentang klasifikasi hutan. Tiada kompensasi sehubungan dengan mata pencaharian utama mereka (bertani dan memungut hasil hutan) mengakibatkan mereka merambah *leuweung kolot* untuk ladang (menghindari dari kejaran petugas kehutanan) yang sesungguhnya menurut sistem pengetahuan mereka tidak boleh dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa masyarakat kasepuhan sendiri terlibat dalam penebangan liar (Adimihardja, 1992) dan penambangan emas liar (Suhaeri, 1992) di kawasan *leuweung kolot* dan *leuweung titipan*. Kedua kegiatan ini semakin menambah akutnya konflik dengan pihak kehutanan.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam usaha mengatasi konflik tersebut, dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat kasepuhan melalui program pengembangan pertanian menetap. Melalui program tersebut yang dimulai sekitar tahun 1986, masyarakat kasepuhan dilibatkan dalam ekonomi uang yang intensitasnya sangat tinggi, seperti program kredit, bibit padi varietas baru, pupuk/pestisida, alat membunuh hama dan lain-lain dalam bentuk sawah. Sayangnya, program ini menemui kegagalan akibat tiga aspek:

1. Aspek budaya. Tata cara pengolahan sawah dapat menghancurkan tata cara tradisi *tatali paranti karuhun* yang penuh nuansa keagamaan sehingga dapat mengancam masyarakat kasepuhan sebagai satu kesatuan kelompok sosial. Sebagai contoh, padi merupakan personifikasi dari Dewi Sri sehingga dilarang bagi masyarakat kasepuhan untuk menjual padi demi kepentingan ekonomi (Kompas, 18 Oktober 2003c). Ditambah dengan kenyataan bahwa masyarakat kasepuhan hanya membolehkan lahan ditanami oleh padi satu kali dalam setahun. Begitu pula dengan jenis varietas padi yang diperkenalkan pemerintah tumbuh lebih pendek daripada padi lokal. Akibatnya, padi ini tidak bisa dituai dengan ketam '*etem*', tetapi harus disabit/ditebas. Cara melepaskan biji padi dari tangkainya ialah dengan diinjak-injak atau dibantingkan, dimana kedua cara ini menyimpang dari tata cara kebiasaan nenek moyang mereka.
2. Aspek teknis. Cara pengolahan sawah mengharuskan menggunakan pupuk, saluran air yang baik, obat untuk membunuh hama, pembelian bibit yang kesemuanya memerlukan modal yang tidak sedikit. Cuaca juga menjadi alasan penolakan pengembangan sawah dengan varietas padi baru karena tidak cocok dengan cuaca yang dingin (Adimihardja, 1992).
3. Aspek ketahanan pangan. Masyarakat kasepuhan menggunakan *leuit* (lumbung padi) sebagai tempat menyimpan padi mereka. Selain anggapan bahwa jenis padi baru tidak tahan lama dan mudah diserang hama jika disimpan lama, kekhawatiran gagal panen sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan kelompok sosial kasepuhan sehingga para pemimpin kasepuhan cenderung untuk mengembangkan pola pertanian yang mereka kenal (Yogaswara, 2002).

Konflik diantara pihak kehutanan dan masyarakat kasepuhan diakui pula oleh Elip dan Bayuardi (2001). Mereka menemukan bahwa minimnya pengakuan pihak kehutanan terhadap keberadaan masyarakat kasepuhan dan ketergantungannya terhadap hutan telah mengakibatkan:

1. Lahan garapan menyempit. Dampaknya tentu saja adalah berkurangnya penghasilan pertanian baik dari *huma* dan sawah.

2. Volume mata air menipis. Pihak kehutanan melakukan penebangan tanpa memperhatikan kawasan-kawasan mata air maupun Daerah Aliran Sungai (DAS). Akibatnya, kasus-kasus kekeringan dan banjir besar seringkali timbul di sekitar Pelabuhan Ratu dan Kecamatan Cisolok, Sukabumi (Kompas, 22 November 2003d ; Kompas, 27 November 2000e).
3. Pengklasifikasian hutan oleh masyarakat kasepuhan memudar. Klasifikasi hutan sebagai penuntun masyarakat dalam pemanfaatan hutan semakin memudar akibat penebangan, baik legal dan ilegal, di kawasan mata air. Tekanan ekonomi akibat sempitnya lahan garapan memaksa masyarakat kasepuhan untuk terlibat pula dalam penebangan liar.

Konflik akibat hal yang sama diakui pula oleh Harimurti (1997) dan Yogaswara (2001). Sosiobudaya masyarakat kasepuhan dalam pemanfaatan hutan untuk perladangan berpindah dan kampung gede menjadi salah satu faktor penyebab konflik dengan pihak kehutanan. Beberapa kawasan hutan yang diklasifikasikan sebagai hutan titipan dimanfaatkan oleh masyarakat kasepuhan sebagai lahan perladangan berpindah dan kampung gede. Sayangnya, kawasan hutan ini berada di bawah penguasaan pihak kehutanan dan kedua kegiatan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian hutan. Menurut pihak kehutanan, sekitar 1137,22 ha hutan taman nasional menjadi lahan garapan/bekas garapan (Departemen Kehutanan, 2003a; Departemen Kehutanan, 2003e) dan hanya 30 ha hutan tersebut berhasil direhabilitasi (Kompas, 1 November 2003f).

Akibat tekanan dari pihak kehutanan dalam menerapkan sistem pengetahuan mengenai klasifikasi hutan, tanpa mempedulikan sistem pengetahuan yang dianut oleh masyarakat kasepuhan, Adimihardja *et al* (1994) menemukan perubahan sistem pengetahuan klasifikasi hutan. Perubahan ini lebih merupakan usaha penyesuaian mereka dengan klasifikasi hutan yang dianut oleh pihak kehutanan. Masyarakat kasepuhan hanya mengenal tiga klasifikasi hutan yaitu lahan kehutanan yang tidak boleh dijamah dan dikelola oleh taman nasional yaitu *leuweung geledegan/kolot*, lahan kehutanan penghijauan yang dikelola Perum Perhutani dan boleh digarap penduduk yang disebut *taneman* dan lahan kehutanan yang menjadi garapan penduduk yaitu berupa *sawah*, *leuweung/reuma* dan kebun/*talun*. Ketiga klasifikasi hutan ini jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya ditemukan oleh Adimihardja (1992) dan Kuswanda (1999). Walaupun telah terjadi perubahan sistem pengetahuan, sulit untuk mengetahui apakah perubahan ini dapat mengancam kelestarian hutan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya oleh Adimihardja (1992).

Kesimpulan

Kegiatan pemanfaatan hutan yang dipraktekkan oleh masyarakat kasepuhan di kawasan Gunung Halimun merupakan hasil adaptasi dengan kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat kasepuhan dan dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional serta pengetahuan lokal warisan leluhur masyarakat ini yang tetap dipertahankan untuk kemudian diwariskan kembali secara turun temurun kepada generasi berikutnya.

Interaksi yang terjadi antara masyarakat kasepuhan dengan hutan memiliki nilai-nilai sosiobudaya dan keagamaan yang kuat sehingga terbentuk suatu pengetahuan terhadap hutan yang berfungsi memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial. Interaksi seperti ini bukan merupakan ancaman bagi kelestarian hutan di kawasan Gunung Halimun. Namun demikian, pihak kehutanan sudah saatnya untuk sungguh-sungguh memahami dinamika masyarakat yang dilandasi nilai, norma dan persepsi yang dianut masyarakat kasepuhan yang bermukim di sekitar kawasan Gunung Halimun. Upaya pihak kehutanan yang menempatkan masyarakat kasepuhan sebagai ancaman kelestarian hutan, sengaja dan/atau tanpa sengaja, menyebabkan konflik, sehingga menjadikan hutan lebih terancam kelestariannya. Minimnya pengakuan pihak kehutanan terhadap interaksi masyarakat kasepuhan dengan hutan di dalam konteks pengelolaan hutan telah menyurutkan peluang untuk memanfaatkan sistem pengetahuan masyarakat kasepuhan yang semakin luntur untuk melestarikan hutan.

Apabila pihak kehutanan benar-benar ingin menjaga kelestarian hutan di kawasan Gunung Halimun, upaya memahami dan mengakui dinamika masyarakat kasepuhan melalui pengembangan kelembagaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar konflik yang timbul di sekitar kawasan Gunung Halimun dapat dihindari. Perlunya kebijakan yang aplikatif dalam melindungi hak dan sistem masyarakat adat di tingkat lokal (RMI, 2004) dan upaya mempersatukan sistem pengelolaan hutan menurut masyarakat kasepuhan dan pihak kehutanan merupakan awal yang baik dalam menyelesaikan konflik ini. Namun, perlu pula ditelusuri sistem pengelolaan masyarakat kasepuhan ditinjau dari aspek keanekaragaman hayati, fungsi hidrologis dan lain-lain.

Daftar pustaka

- Adimihardja, K. 1999. Mendayagunakan Kearifan Tradisi dalam Pertanian yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan *dalam Petani: Merajut Tradisi Era Globalisasi* ed. K. Adimihardja hal. 3-57. Bandung: Humaniora.
- Adimihardja, K. 1992. Kasepuhan Yang Tumbuh Di Atas Yang Luruh. Bandung: Tarsito.
- Adimihardja, K., A. M. Kramadibrata, dan O.S. Abdullah. 1994. Penelitian Hubungan Timbal Balik Masyarakat Pedesaan Dengan Hutan Di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung: BAPPEDA dan INRIK-UNPAD.
- Adimihardja, K. 1983. Generations from Banten: A Wandering Spritual Leader and His Followers in West Java. M.A. Thesis. Canberra: The Australian National University.
- Asep. 2000. Kesatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Departemen Kehutanan. 2003a. Laporan Tahunan: Balai Taman Nasional Gunung Halimun Tahun 2002. Kabandungan: PHKA.
- Departemen Kehutanan. 2003b. Statistik: Balai Taman Nasiobal Gunung Halimun Tahun 2002. Kabandungan: PHKA.
- Dienaputra, R.D. 2003. Kawasan Gunung Halimun: Suatu Tinjauan Historis *dalam Prosiding Seminar Sehari: Tantangan Sumberdaya Alam di dalam Ekosistem Gunung Halimun, 31 Maret 2003*. Bogor: ICRAF (draft).
- Djatisunda, A. 1984. Waris Pancer Pangawinan. *Mangle* 843: 30-36.
- Elip, E., dan G. Bayuardi. 2001. Kasepuhan Sirnaresmi: Sebuah Masyarakat Adat dalam Transisi (Desa Sirnaresmi, Kec. Cisolak, Kab. Sukabumi). Lembaga NAWAKAMAL-Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif-DFID.
- Harimurti, H. 1997. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun: Studi tentang Faktor Penyebab Timbulnya Konflik dalam Pengelolaan Kawasan Hutan, di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung: Universitas Padjajaran.
- INRIK dan KEHATI. 1999. *Leuweung Titipan*: Tanah Harapan Warga Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat (Pendekatan Partisipatif dalam Pemetaan Tanah Adat). Bandung: INRIK-KEHATI.
- Kompas. 2003a. Langit adalah Bapak, Bumi sebagai Ibu. 23 Agustus 2003: 31.
- Kompas. 2003b. Belajar Kemandirian dari Lereng Gunung Halimun. 23 Agustus 2003: 30.
- Kompas. 2003c. Kemakmuran Model Cipta Gelar. 18 Oktober 2003: 30.
- Kompas. 2003d. Banjir Bandang di Pelabuhan Ratu Akibat Penggundulan Hutan. 22 November 2003: 9.
- Kompas. 2003e. Pelabuhan Ratu Diterjang Banjir Bandang, 1050 Rumah Terendam. 27 November 2003: 20.
- Kompas. 2003f. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dirambah. 1 November 2003: 28.
- Kurniawan, I. 2002. Sistem Pengelolaan Lahan oleh Masyarakat Kasepuhan di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- Kuswanda, W. 1999. Pendugaan Parameter Demografi Populasi Owa Jawa (*Hylobates moloch*) di Taman Nasional Gunung Halimun. Skripsi Fakultas Kehutanan. Bogor: IPB.
- LEAD dan INRIK. 1995. Hubungan Timbal Balik Masyarakat Pedesaan dengan Hutan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Bandung: LEAD-INRIK.

- RMI. 2004. Kawasan Ekosistem Halimun: “*Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang*” Menengok Sejarah, Merencanakan Hari Esok. Bogor: Rimbawan Muda Indonesia (RMI) (draft).
- Suhaeri. 1994. Pengembangan Kelembagaan Taman Nasional Gunung Halimun. Thesis Pascasarjana. Bogor: IPB.
- Yogaswara, H. 2002. Dynamics of Land Tenure System: The Case Study of the Kasepuhan Ciptarasa, West Java, Indonesia. Thesis of Graduate School. Ateneo de Manila University.

WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF)
SOUTHEAST ASIA REGIONAL OFFICE WORKING PAPERS



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

